

TUGAS AKHIR

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP OPERASIONAL
PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : SISKA MARETHA NOVIA SUMANTRI
NIM : 2215613078

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP OPERASIONAL PADA PEMERINTAH PROVINSI BALI

Siska Maretha Novia Sumantri

2215613078

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap operasional pada Pemerintah Provinsi Bali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi. Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dengan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui teknik wawancara tidak terstruktur dengan beberapa narasumber dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perlakuan akuntansi atas aset tetap telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 yang berlaku, meskipun masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal penghentian/pelepasan. Ketidaksesuaian tersebut meliputi tidak dilakukannya penghentian/pelepasan pada aset tetap yang tidak memiliki manfaat ekonomis, belum dilaksanakan revaluasi terhadap aset tetap yang masih memberikan umur teknis dalam operasional serta nilai aset tetap yang hilang atau belum ditemukan belum dikeluarkan dari nilai aset tetap operasional.

Kata Kunci: *perlakuan akuntansi, aset tetap, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penghentian, pelepasan.*

ACCOUNTING TREATMENT OF OPERATIONAL FIXED ASSETS IN THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI

Siska Maretha Novia Sumantri

2215613078

(Program Study D3 Accounting, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

This study aims to analyze the conformity of accounting treatment for operational fixed assets in the Provincial Government of Bali with the Governor of Bali Regulation Number 40 of 2023 concerning Accounting Policies. The research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bali Province using a descriptive qualitative research approach. Data were collected through unstructured interviews with several informants and documentation techniques. The results of the study indicate that most of the accounting treatments for fixed assets are in accordance with the applicable Governor Regulation Number 40 of 2023. However, there are still discrepancies in terms of disposal/release. These discrepancies include the absence of disposal/release for fixed assets that no longer have economic benefits, the revaluation of fixed assets that still provide technical life for operations has not yet been carried out, and the value of lost or unrecovered fixed assets has not been removed from the operational fixed asset value.

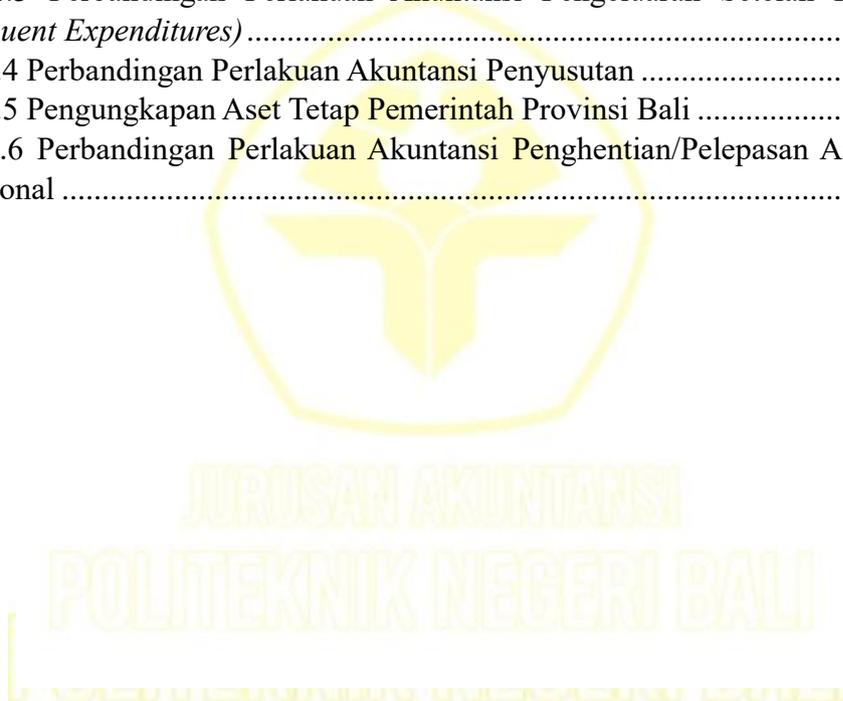
Keywords: *accounting treatment, fixed assets, recognition, measurement, disclosure, discontinuation, disposal.*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Abstrak	ii
Abstrak	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Tugas Akhir	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Standar Aktivitas	5
B. Praktik Baik Aktivitas	15
BAB III METODE PENULISAN	23
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	23
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	23
BAB IV PEMBAHASAN	26
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	26
B. Deskripsi Aktivitas	27
C. Pembahasan.....	29
BAB V PENUTUP	38
A. Simpulan	38
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Aset Tetap Operasional Provinsi Bali Habis Masa Manfaat Tahun 2024.....	2
Tabel 2.3 Aset Tetap Operasional yang Disusutkan dan Tidak Disusutkan	10
Tabel 2.1 Data Persentase Kapitalisasi Sebagai Penambah Masa Manfaat	17
Tabel 2.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Operasional Pemerintah Provinsi Bali	19
Tabel 3. 1 Alur Instrumen Pengumpulan Data	25
Tabel 4.1 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap Operasional	30
Tabel 4.2 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Penilaian Awal.....	32
Tabel 4.3 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pengeluaran Setelah Perolehan (<i>Subsequent Expenditures</i>)	33
Tabel 4.4 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Penyusutan	34
Tabel 4.5 Pengungkapan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Bali	35
Tabel 4.6 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Penghentian/Pelepasan Aset Tetap Operasional	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rumus Penentuan Persentase Subsequent Expenditures	9
Gambar 2. 2 Skema Penghentian Aset Tetap Operasional	14



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Waktu Penelitian.....	43
Lampiran 2	: Surat Rekomendasi Penelitian	43
Lampiran 3	: Daftar Pertanyaan Wawancara	44
Lampiran 4	: Berita Acara Wawancara	52
Lampiran 5	: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi.....	55
Lampiran 6	: Laporan Operasional Konsolidasi	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dalam menjalankan roda pemerintahan, sistem ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah (Labasido & Darwanis, 2019). Pelaksanaan otonomi daerah ini menuntut tanggung jawab daerah dalam pelaporan kinerja salah satunya keuangan daerah yang mencakup pengelolaan atas aset tetap daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi relevan, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui salah satunya nilai aset tetap yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan (Khafiyya, 2016). Dalam penyusunannya berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Kaawoan et al., 2024).

Aset tetap operasional merupakan komponen pendukung pelaksanaan aktivitas instansi pemerintah dan berperan dalam meningkatkan produktivitas Pemerintah Daerah (Dwitayantu & Zahara, 2018). Kelayakan atas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini berdasarkan hasil auditnya. Permasalahan umum terjadi pada aset tetap pemerintahan disebabkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai, sehingga berdampak pada ketidakwajaran pelaporan aset tetap pada laporan posisi keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Bali merupakan salah satu pemerintah dengan akuntabilitas yang baik merujuk pada hasil audit BPK. Dalam pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur No.40 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Pemerintah Daerah Provinsi Bali sejak tahun 2022 hingga 2023 mendapat opini WTP, namun dalam proses auditnya ditemukan temuan tidak signifikan tentang aset tetap daerah Bali, yaitu adanya kesalahan dalam klasifikasi aset, penghentian/pelepasan aset tetap yang disebabkan oleh umur ekonomisnya telah berakhir dan bagaimana perlakuan aset tetap yang fisiknya masih baik dan bisa dipergunakan dengan baik dalam menunjang kegiatan pemerintahan, namun umur ekonomisnya sudah habis.

Berikut data aset tetap Provinsi Bali Tahun 2024 yang habis masa manfaatnya sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Daftar Aset Tetap Operasional Provinsi Bali Habis Masa Manfaat
Tahun 2024

Kode Aset	Nama Aset	Jumlah/Unit
1.3.2.5.2.1.2	Meja Kayu	8
1.3.2.5.2.1.32	Kursi Putar	60
1.3.2.5.2.4.4	A.C. <i>Split</i>	17

Sumber: Daftar Aset Tetap BPKAD Provinsi Bali dan Data Diolah

Penggunaan aset tetap yang telah habis masa manfaatnya tanpa adanya pencatatan lebih lanjut terkait beban penyusutan dapat mengurangi keandalan informasi dalam laporan keuangan. Aset tetap yang telah disusutkan hingga bernilai Rp. 0,00 tetapi masih dioperasikan, mencerminkan bahwa perlakuan

atas biaya operasional aset tetap terkait belum sepenuhnya andal. Kondisi ini mengakibatkan nilai aset tetap operasional yang tercantum tercantum dalam laporan keuangan belum mencerminkan kondisi fisik dan ekonomis yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena adanya permasalahan di aset tetap daerah terhadap perlakuan akuntansinya maka perlu dilakukan analisis tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Operasional Pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, kesenjangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi aset tetap operasional pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali?
2. Apakah perlakuan akuntansi aset tetap operasional Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah sesuai Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan landasan fenomena dan rumusan kesenjangan, tujuan penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap operasional pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

- 2) Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap operasional pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2023.

2. Manfaat Penulisan

Penelitian terkait analisa perlakuan akuntansi aset tetap operasional pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam perlakuan aset tetap operasional ke depannya pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru terkait analisa perlakuan aset tetap operasional terkhususnya pada bidang akuntansi pemerintahan dan dapat memberikan sumbangan konseptual dalam membantu mahasiswa atau pihak peneliti lain dalam menganalisis perlakuan aset tetap operasional pada lingkup pemerintah daerah.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang perlakuan aset tetap operasional di lingkup pemerintahan serta dapat dijadikan referensi ilmiah tambahan untuk penelitian berikutnya dengan mengangkat topik yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Perlakuan akuntansi aset tetap operasional pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Perlakuan aset tetap operasional di Pemerintah Provinsi Bali telah terlaksana, terkecuali pada perlakuan akuntansi atas revaluasi aset tetap belum pernah dilaksanakan.

2. Kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap operasional Pemerintah Daerah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2023

Perlakuan akuntansi aset tetap yang mengacu pada Peraturan Gubernur Bali No. 40 Tahun 2023 sebagian besar telah sesuai meliputi perlakuan atas pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penghentian/pelepasan aset tetap. Ditemukan pula ketidaksesuaian terkait perlakuan akuntansi aset tetap, meliputi: (1) Aset tetap yang telah habis masa manfaat/ekonomisnya tidak dilakukan penghentian/pelepasan; (2) Aset tetap yang hilang atau aset tetap yang belum ditemukan keberadaannya tidak dikeluarkan dari nilai aset tetap neraca ataupun direklasifikasi ke akun aset lain-lainnya; dan (3)

Proses penilaian kembali aset tetap belum pernah dilakukan, sehingga nilai aset tetap belum sepenuhnya mencerminkan nilai wajar.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka disampaikan beberapa saran sebagai sarana masukan bagi Pemerintah terkhususnya Pemerintah Provinsi Bali, yaitu:

1. Diharapkan ketentuan dan kebijakan terkait perlakuan akuntansi aset tetap yang telah habis masa manfaat dapat disusun dan diperjelas, guna mencegah potensi kerugian pada instansi.
2. Diharapkan perlakuan akuntansi aset tetap dalam hal revaluasi aset tetap dapat diterapkan. Mengetahui pentingnya penilaian kembali aset tetap untuk menyesuaikan nilai wajar saat ini, terkhususnya pada aset tetap tanah yang rentan mengalami kenaikan nilai secara signifikan dan aset yang umur manfaatnya telah habis namun masih memberikan umur teknis. Terkhusus untuk perlakuan atas aset tetap yang masih memberikan umur teknis, namun umur manfaatnya telah habis dapat juga dilaksanakan penaksiran atas umur manfaatnya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N., Mulyani, S., & Alfian, A. (2020). *Akuntansi Pemerintah Daerah Basis Akrual pada Entitas Akuntansi : Konsep dan Aplikasi*. Prenada Media.
- Dwitayantu, Y., & Zahara, H. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 4(1), 81–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.30873/jbd.v4i1.1324>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Kaawoan, Y. M., Runtu, T., & Kindangen, W. D. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 Pada Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 12(3), 1534–1543. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v12i03.58077>
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., & Siregar, S. V. (2012). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1* (Vol. 1). Salemba Empat.
- Khafiyya, N. A. (2016). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen & Akuntansi*, 5(3), 1–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/ekm.v5i3.2522>
- Khatami, F. H., Lasmana, A., & Hambani, S. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Daerah Dalam Laporan Keuangan Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Pemerintah Daerah Kota Serang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 447–453. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11083080>
- Labasido, E. R., & Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2), 1.
- Muhsan, M., Dunakhir, S., & Tikollah, M. R. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2369>
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2008). *Akuntansi Pemerintahan* (R. Widyaningrum, Ed.). Salemba Empat.
- Peraturan Gubernur Bali No. 40, Pemerintah Gubernur Bali 70 (2023).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, Komite Standar Akuntansi Pemerintah 135 (2025).

- Rimbing, S. H. R., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2021). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Supiori Papua. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1685–1691. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.35950>
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula* (A. Juhari, Ed.). Agma.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung.

